



ANALISIS WACANA KRITIS BERITA TEMPO.CO KUBU ANIES DAN GANJAR INGIN BATALKAN HASIL PILPRES KE MK

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF NEWS TEMPO.CO ANIES AND GANJAR CAMPS AIM TO CHALLENGE PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS AT CONSTITUTIONAL COURT

Ema¹

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl.HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

ema@fisip.unsika.ac.id

Diterima tgl. Desember 2023 Direvisi tgl. Desember 2023 Disetujui tgl. Desember 2023

ABSTRACT

This research focuses on the discourse of the 2024 Presidential Election in Indonesia and the intention of the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar and Ganjar Pranowo-Mahfud MD camps to annul the election results by filing a lawsuit with the Constitutional Court as reported by the TEMPO.CO media portal. Utilizing qualitative research methods and a Critical Discourse Analysis approach, this study explores the construction of narratives and political rhetoric in related news. The research findings indicate that the issue of the lawsuit to the Constitutional Court is part of a larger political dynamic in the context of the 2024 Election in Indonesia. This research provides a deep understanding of how political narratives and rhetoric are used to influence public opinion and shape political discourse. This research also hopes to assist readers in developing their critical abilities in assessing the truth of news.

Keywords: *Presidential Election, Critical Discourse Analysis, Political Narrative, Political Rhetoric, Election Fairness*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada wacana Pilpres 2024 dan niat kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membatalkan hasil Pilpres dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Portal media TEMPO.CO. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan Analisis Wacana Kritis, penelitian ini mengeksplorasi konstruksi naratif dan retorika politik dalam berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu gugatan ke MK adalah bagian dari dinamika politik yang lebih besar dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana narasi dan retorika politik digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk diskursus politik. Penelitian ini juga berharap dapat membantu pembaca dalam mengembangkan kemampuan kritis mereka dalam menilai kebenaran berita.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Analisis Wacana Kritis, Naratif Politik, Retorika Politik, Keadilan Pemilu

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam konteks kehidupan politik suatu negara, di mana menentukan pemimpin melibatkan suara dari para pemilih untuk memimpin bangsa. Pilpres 2024 di Indonesia menjadi fokus utama, terutama dengan munculnya berita tentang niat kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membatalkan hasil Pilpres dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (BBC New Indonesia, 2024). Keputusan ini tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap dinamika politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai demokratisasi, integritas pemilihan, dan keadilan dalam konteks pesta demokrasi.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada rencana kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk mengajukan gugatan ke MK dengan tujuan membatalkan hasil Pilpres 2024 (Khoirul & Dian,



2024). Isu ini menjadi serius karena melibatkan potensi tindakan hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan legitimasi hasil Pemilu. Penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah persiapan dan alasan di balik niat mengajukan gugatan, serta potensi dampaknya terhadap hasil Pilpres 2024 (Khoirul & Dian, 2024).

Dalam pemberitaan tersebut, Mahfud menyatakan bahwa meskipun kubu Ganjar-Mahfud belum mengajukan gugatan, tim hukum pasangan calon nomor urut 03 telah menyiapkan bukti untuk sidang sengketa Pilpres. Menurut keterangannya bahwa partai pengusung, yaitu PPP dan PDIP, akan tetap solid dan tidak akan mundur dalam mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sealin itu, TPN (Tim Pemenangan Nasional) sudah siap dan lengkap dengan bukti-bukti yang diperlukan. Dia menegaskan bahwa mereka menunggu putusan resmi KPU sebelum mendaftar ke MK (Mahkamah Konstitusi). Dia juga menginformasikan bahwa masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 telah ditutup pada 6 Februari 2024, dan masa reses DPR akan berlangsung mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024.

Melalui cara politik akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka, membantah tuduhan bahwa ancaman hak angket hanyalah gertakan semata. Dengan demikian, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan strategi politik dan mengklarifikasi bahwa langkah-langkah politik akan diambil saat proses persidangan di DPR berlangsung.

Secara teoretis, penelitian ini merinci sejarah pemilihan presiden sebelumnya dan kasus-kasus sengketa yang melibatkan MK. Dengan melibatkan analisis wacana kritis, penelitian ini bertujuan untuk membongkar konstruksi naratif dan retorika politik (Fitriana et al., 2020), yang muncul dalam berita terkait, serta menggali pemahaman mendalam tentang konteks politik yang melingkupi keputusan ini.

Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek pemilihan presiden dan sengketa hasilnya. Penelitian (Hidayah et al., 2022) tentang objektivitas media dalam menyampaikan berita sengketa Pilpres RI tahun 2019. Namun, belum ada studi yang secara khusus menganalisis wacana kritis berita mengenai niat kubu Anies dan Ganjar untuk membatalkan hasil Pilpres ke MK. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika politik, media, dan demokrasi di Indonesia.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, terdapat ketidakseimbangan dalam pemberitaan kandidat presiden oleh media massa di Indonesia. Menurut Sapitri & Nurafifah (2019), terdapat delapan stasiun televisi yang cenderung mendukung pasangan Joko Widodo & Ma'ruf Amin, sementara hanya satu stasiun televisi yang mendukung pasangan Prabowo & Sandiaga Uno. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemberitaan politik oleh media massa di Indonesia (Afgiansyah, 2022).

Untuk memahami lebih dalam, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) sebagai kerangka analisisnya. Dalam penelitian komunikasi, CDA digunakan untuk mengungkap ideologi tersembunyi dalam teks dengan mendekonstruksi asumsi yang umum di masyarakat. CDA mengungkap ketidaksesuaian dalam masyarakat dengan mengidentifikasi sumber dan penyebabnya (seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kurangnya kebebasan), dan kemudian menemukan cara untuk melawannya. Oleh karena itu, CDA dianggap kritis, karena tradisi kritis dalam analisis sosial berkontribusi pada analisis sosial kritis, dengan fokus pada wacana dan hubungan antara wacana dan elemen sosial lainnya (kekuasaan, ideologi, institusi, dan identitas sosial). Analisis sosial kritis bersifat normatif dan eksplisit (Fairclough 2013; Fitriana et al., 2020).

Dengan mengambil pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini diharapkan dapat membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang konstruksi bahasa dalam berita TEMPO.CO, serta implikasi politik dan sosial dari keputusan ini. Studi ini relevan dalam memahami bagaimana narasi dan retorika politik digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk diskursus politik dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia.

1.1. Kontruksi Naratif dan Retorika Politik

Membongkar konstruksi naratif dan retorika politik yang melibatkan analisis mendalam terhadap bagaimana cerita atau narasi dibangun dan bagaimana bahasa dipilih untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Melalui kerangka teoritis didasarkan pada pemahaman mendalam tentang konsep analisis wacana kritis (AWK), yang memberikan landasan untuk membongkar konstruksi naratif dan retorika politik dalam berita mengenai niat kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Prabowo-Mahfud MD untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Teori ini menyoroti pentingnya memahami penggunaan bahasa, pemilihan kata, dan framing dalam membentuk persepsi publik terhadap langkah hukum yang diambil oleh kedua kubu politik tersebut.

Wacana atau komunikasi sebagai media untuk berinteraksi, untuk bertukar informasi dan berbagi untuk mendapatkan respon. Saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap, berbagi perilaku atau sikap hidup melalui perangkat kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut. Sebagai upaya untuk menyampaikan sikap dan tujuan kepada orang lain agar mau mengubah sikap, pendapat dan perilaku baik langsung maupun tidak langsung (Sahreza, 2018; Fitriana et al., 2020).

Selain itu, kerangka teoritis ini juga mengintegrasikan konsep-konsep terkait seperti analisis tone, sumber daya, dan nilai-nilai politik untuk memberikan perspektif yang holistik terhadap bagaimana retorika politik diungkapkan melalui bahasa dalam konteks berita politik. Dengan demikian, penelitian ini merangkum landasan konseptual yang relevan untuk memahami, mengevaluasi, dan membongkar naratif politik melalui analisis wacana kritis pada berita terkait Pilpres 2024 di Indonesia.

Melalui AWK menganggap bahasa sebagai instrumen kekuasaan. AWK melampaui pandangan bahasa hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai medium yang memuat ideologi yang ingin disampaikan kepada pembaca (Marzuki, 2023). Fokus AWK adalah menjelajahi ideologi yang tersembunyi dalam teks, membongkar ketidakberesan sosial, diskriminasi, dominasi, dan aspek-aspek lainnya (Pramitasari & Nanda Ayu Clarasida, 2022). Penulis berharap bahwa pemahaman wacana dapat dipahami lebih dalam.

Lebih jelas bahwa, wacana bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga terkait dengan konteks sosial budaya, memiliki sejarah yang terkait dengan peristiwa lain, berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, dan sarat dengan ideologi yang ingin disampaikan penulis. Melalui contoh penerapan AWK Norman Fairclough dalam analisis wacana berita, buku ini mencoba membekali pembaca agar tidak hanya menerima berita sebagai kebenaran mutlak, tetapi juga mengkritisi kebenarannya. Dengan fokus pada wacana berita, buku ini menghadirkan pemahaman tentang bagaimana AWK dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini.

Dalam konteks membongkar konstruksi naratif dan retorika politik yang melibatkan analisis mendalam terhadap cerita atau narasi tentang niat kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Prabowo-Mahfud MD untuk membatalkan hasil Pilpres 2024, kerangka teoritis yang

digunakan adalah AWK. AWK memberikan landasan untuk mengungkap bagaimana bahasa dipilih untuk menyampaikan pesan politik tertentu dan bagaimana naratif dibangun dalam berita.

Analisis Wacana Kritis memandang bahasa sebagai instrumen kekuasaan, melebihi sekadar alat komunikasi. Bahasa dianggap sebagai medium yang memuat ideologi dan dapat membentuk persepsi publik. Fokus AWK adalah menggali ideologi tersembunyi dalam teks, membongkar ketidakberesan sosial, diskriminasi, dan dominasi. AWK mencoba menjelajahi lapisan-lapisan makna dalam teks dan memahami bagaimana kekuasaan direproduksi melalui bahasa.

Selain itu, kerangka teoritis ini mengintegrasikan konsep-konsep terkait seperti analisis tone, sumber daya, dan nilai-nilai politik. Analisis tone dapat memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa dipilih untuk mengkomunikasikan emosi atau sikap tertentu. Sumber daya mengacu pada kekuatan atau keterbatasan yang dimiliki oleh aktor dalam produksi teks. Nilai-nilai politik mencakup pandangan atau prinsip politik yang tercermin dalam bahasa.

Dalam membongkar naratif politik, AWK diimplementasikan untuk mengungkapkan makna tersembunyi, mengidentifikasi framing, dan memahami bagaimana pesan politik disampaikan melalui bahasa. Wacana, dalam konteks ini, tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial, tetapi juga terkait dengan konteks sosial budaya dan memiliki sejarah yang memengaruhi makna.

Contoh penerapan AWK Norman Fairclough dalam analisis wacana berita dapat membantu pembaca untuk tidak hanya menerima berita sebagai kebenaran mutlak, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai kebenaran. Melalui pemahaman tentang AWK, pembaca dapat membongkar naratif politik dalam berita terkait Pilpres 2024 di Indonesia, khususnya yang dilaporkan oleh media TEMPO.CO. Dengan demikian, riset wacana kritis di media tersebut dapat menjadi sebuah pemahaman mendalam terhadap konstruksi naratif dan retorika politik yang terlibat dalam upaya membatalkan hasil Pilpres.

Dalam paradigma kritis, penelitian media massa ditempatkan pada pemahaman bahwa teks atau wacana dalam media massa memiliki pengaruh signifikan terhadap manusia. Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan melalui teks media massa. Teks tersebut tidak dianggap sebagai realitas yang bebas nilai, melainkan dipandang sebagai pembawa kepentingan. Pada tingkat kesadaran dasar manusia, teks selalu mencerminkan suatu bentuk kepentingan. Teks pada dasarnya dianggap sebagai realitas yang memihak dan digunakan untuk memenangkan pertarungan ide, kepentingan, atau ideologi dari kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media dianggap bersifat ideologis (Littlejohn dan Foss, 2011:183-217; Maghvira, 2017).

Paradigma kritis dalam penelitian media massa menekankan pemahaman bahwa teks atau wacana dalam media massa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap subyektif manusi. Semua aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat terjadi melalui teks media massa. Pemahaman ini menolak pandangan bahwa teks dianggap sebagai realitas yang bebas nilai, melainkan dipandang sebagai medium yang membawa serta kepentingan tertentu. Pada tingkat kesadaran dasar manusia, teks selalu mencerminkan bentuk kepentingan tertentu.

Teks pada dasarnya dianggap sebagai realitas yang bersifat partisan dan digunakan untuk memenangkan pertarungan ide, kepentingan, atau ideologi dari kelompok tertentu. Pada titik tertentu, teks media dianggap bersifat ideologis, mencerminkan nilai-nilai dan pandangan dari kelas atau kelompok tertentu.

Dalam paradigma kritis, analisis terhadap teks berita online TEMPO.CO pada Minggu, 03 Maret 2024, jam 09:35 WIB dengan judul "Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ajukan Hak Angket DPR dan Gugatan Pemilu 2024 ke MK" dilakukan untuk membongkar konstruksi naratif dan retorika politik yang terkandung dalam berita tersebut. Penelitian ini fokus pada pemahaman

bagaimana teks tersebut membawa serta dan merefleksikan kepentingan, nilai-nilai, serta ideologi dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam menyikapi situasi terkini terkait hasil Pilpres 2024.

1.2 Rumusan dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar konstruksi naratif dan retorika politik dalam berita terkait Pilpres 2024 di Indonesia, khususnya yang melibatkan niat kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membatalkan hasil Pilpres. Tujuan ini akan dicapai melalui penerapan kerangka teoritis Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough.

Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Konstruksi Naratif, bagaimana cerita atau narasi dibangun dalam berita? Bagaimana bahasa dipilih dan digunakan untuk menyampaikan pesan politik tertentu?
- 2) Membongkar Retorika Politik: Bagaimana retorika politik diungkapkan melalui bahasa dalam konteks berita politik? Bagaimana penggunaan bahasa, pemilihan kata, dan framing dapat membentuk persepsi publik terhadap langkah hukum yang diambil oleh kedua kubu politik tersebut?
- 3) Mengungkap Ideologi Tersembunyi, bagaimana ideologi dan kepentingan tertentu dapat tersembunyi dalam teks dan bagaimana mereka dapat direproduksi melalui bahasa?
- 4) Mengkritisi Kebenaran Berita: Bagaimana pembaca dapat mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai kebenaran berita dan tidak hanya menerima berita sebagai kebenaran mutlak?

Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana naratif politik dibangun dan bagaimana retorika politik diungkapkan melalui bahasa dalam konteks berita politik. Selain itu, penelitian ini juga berharap dapat membantu pembaca dalam mengembangkan kemampuan kritis mereka dalam menilai kebenaran berita.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor (Moleong, 2009; Hidayah et al., 2022) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati. Data yang dikaji dalam penelitian ini berupa data deskriptif berwujud kata-kata tertulis mengenai teks berita pengesahan RUU KPK pada tiga portal berita daring terbaik di Indonesia, yaitu Kompas.com, Tempo.co. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan ideologi dalam teks berita fokus pada upaya pembatalan hasil Pilpres 2024 oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Tempo.co yang kemudian dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough.

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa kata, frasa, atau kalimat yang terindikasi sebagai ideologi dalam teks berita upaya pembatalan hasil Pilpres 2024 oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Sumber data berasal dari teks berita yang diterbitkan oleh portal berita online Tempo.co. pada Minggu, 03 Maret 2024, jam 09:35 WIB dengan judul, “Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ajukan Hak Angket DPR dan Gugatan Pemilu 2024 ke MK”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dengan dokumen berupa teks wacana berita pada portal berita daring.

Prosedur penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan serta verifikasi temuan. Dengan pendekatan AWK Fairclough, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas ideologi yang terdapat dalam teks berita yang fokus pada upaya pembatalan hasil Pilpres 2024 oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Tempo.co.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana berita yang diterbitkan oleh TEMPO.CO pada Minggu, 03 Maret 2024, jam 09:35 WIB dengan judul "Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ajukan Hak Angket DPR dan Gugatan Pemilu 2024 ke MK," tergambar jelas. Langkah ini tampaknya menjadi fokus utama bagi kedua kubu untuk menanggapi dugaan kecurangan atau ketidakberesan yang mungkin mereka rasakan dalam proses pemilihan tersebut. Pada judul tersebut, terdapat unsur persiapan yang mengindikasikan bahwa tindakan ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui perencanaan dan kesiapan yang matang. Langkah tersebut mencakup ajukan hak angket ke DPR dan gugatan ke MK.

Dalam konteks ini, AWK Fairclough diterapkan untuk mengkaji konstruksi naratif dan retorika politik yang terdapat dalam berita tersebut. Pemilihan kata-kata seperti "persiapan," "ajukan hak angket," dan "gugatan" menjadi poin-poin kritis untuk dianalisis, karena dapat membongkar bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk ideologi dan konstruksi naratif terkait usaha pembatalan hasil Pilpres 2024 oleh kedua kubu tersebut.

Berikut data wacana yang akan dianalisis oleh AWK Fairclough;

Data 01:

"TEMPO.CO, Jakarta - Wacana penggunaan hak angket oleh anggota DPR dan rencana melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 menguat hari-hari ini. Usulan tersebut diembuskan calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan didukung capres nomor urut 01 Anies Baswedan".

Dalam teks berita di TEMPO.CO, terdapat penggunaan retorika politik yang menguatkan wacana tentang penggunaan hak angket oleh anggota DPR dan rencana pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Frasa "Wacana penggunaan hak angket" menunjukkan bahwa ada pembahasan atau rencana serius terkait hak angket di DPR. Pemilihan kata "menguat" menggambarkan bahwa dukungan terhadap usulan tersebut semakin kuat atau meningkat seiring berjalannya waktu.

Selanjutnya, kalimat "Usulan tersebut diembuskan calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan didukung capres nomor urut 01 Anies Baswedan" menunjukkan adanya dukungan dari dua calon presiden terkemuka, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, terhadap usulan tersebut. Penggunaan kata "diembuskan" memberikan nuansa bahwa usulan ini bukanlah sesuatu yang bersifat diam-diam, melainkan telah diumumkan atau diutarakan secara terbuka. Dalam analisis retorika politik ini, terlihat bahwa kalimat tersebut dibangun untuk memperkuat naratif tentang upaya penyelesaian dugaan kecurangan Pemilu 2024. Penggunaan kata dan frasa tertentu seperti "menguat," "usulan," dan "diembuskan" mencerminkan pemilihan bahasa yang strategis untuk membentuk pandangan atau sikap tertentu terhadap isu tersebut.

Data 2:

"Tim hukum Timnas Anies-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud Md disebut tengah bersiap menempuh jalur hukum setelah Komisi Pemilihan

Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024. Adapun KPU berencana mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang”.

Narasi berita tersebut, tergambar dengan jelas beberapa aspek yang dapat dianalisis dari perspektif naratif dan retorika politik, yang menunjukkan adanya ideologi dan strategi komunikasi politik yang digunakan oleh kedua kubu. Penggunaan istilah "Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud Md" membentuk naratif solidaritas dan persatuan dalam upaya hukum. Penggunaan "Timnas" menciptakan kesan representasi nasional dalam tim hukum Anies-Muhaimin, sementara "Demokrasi Keadilan" pada tim Ganjar-Mahfud menonjolkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang mereka perjuangkan.

Kemudian, penyebutan bahwa kedua kubu "bersiap menempuh jalur hukum" memberikan nuansa kesiapan dan ketegasan, menekankan bahwa langkah hukum ini bukan keputusan impulsif, melainkan hasil persiapan yang matang. Tanggal pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh KPU pada 20 Maret dijadikan fokus naratif waktu, mungkin dengan tujuan memberikan tekanan dan membangun ketegangan menjelang pengumuman, sekaligus menegaskan kesiapan kubu-kubu tersebut untuk bertindak setelah hasil diumumkan. Pilihan kata "menyebut tengah bersiap" memberikan kesan bahwa kedua kubu sedang dalam tahap persiapan, menunjukkan respons yang terorganisir menghadapi hasil rekapitulasi yang akan diumumkan. Analisis ini mengungkap konstruksi naratif dan retorika politik dalam berita tersebut, menyoroti pemilihan kata dan frasa yang sengaja dipilih untuk membentuk persepsi dan sikap kesiapan dan keseriusan gugatan terkait hasil Pemilu 2024.

Data 3:

“Lantas seperti apa persiapan tim hukum Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud?”

1. TPN Ganjar-Mahfud

“Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md memastikan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 bukanlah sekadar gertakan. Mahfud menyatakan TDK [Ganjar-Mahfud](#) akan mengajukan gugatan ke MK tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024”.

Pertanyaan mengenai persiapan tim hukum Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud, penggunaan kata "persiapan" memberikan kesan bahwa tindakan yang akan diambil oleh kedua tim hukum tersebut tidak bersifat spontan, melainkan telah melalui proses perencanaan dan kesiapan yang matang. Pemilihan kata "persiapan" juga menciptakan naratif tentang kesiapan dan kewaspadaan tim hukum dalam menghadapi situasi tertentu. Pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, pemilihan kata "memastikan" menunjukkan keyakinan dan ketegasan dalam menyatakan bahwa rencana hak angket bukanlah sekadar gertakan atau ancaman kosong. Kata "memastikan" juga menciptakan naratif kepastian dan kejelasan dalam niat dan tindakan yang akan diambil oleh TPN Ganjar-Mahfud.

Penggunaan frasa "rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024" menyoroti tujuan utama dari persiapan yang dilakukan oleh tim hukum TPN Ganjar-Mahfud. Frasa ini secara spesifik mengarahkan perhatian pada upaya untuk menyelidiki dugaan kecurangan, menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokratis. Selanjutnya, dalam pernyataan Mahfud tentang niat untuk mengajukan gugatan ke MK tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024, penggunaan kata "menyatakan" menciptakan kesan bahwa pernyataan tersebut bukanlah sekadar ancaman, tetapi merupakan komitmen yang diumumkan secara

resmi. Kata "tiga hari setelah" menambah dimensi waktu, menegaskan keterlibatan yang cepat dan tanggap terhadap pengumuman hasil Pemilu.

Secara keseluruhan, pemilihan kata dan frasa dalam teks ini berkontribusi pada pembentukan naratif konstruksi dan retorika politik dalam teks tersebut mencerminkan kesiapan, kepastian, dan komitmen kuat tim hukum TPN Ganjar-Mahfud dalam menghadapi potensi permasalahan pasca-Pemilu 2024, dengan menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kewaspadaan terhadap dugaan kecurangan.

Data 4:

"Gugatan ke MK itu baru bisa berjalan pada 24 Maret 2024, kalau jadwal KPU mengumumkan pada 20 Maret, kan berarti 3 hari setelah itu," kata Mahfud saat jogging di Gelora Bung Karno (GBK), pada Jumat, 1 Maret 2024.

Pernyataan Mahfud Md terkait jadwal pengajuan gugatan ke MK, terdapat pemilihan kata dan konstruksi naratif yang dapat dianalisis dari segi retorika politik. Penggunaan kata "baru bisa berjalan" menciptakan naratif penekanan pada keterbatasan waktu atau proses yang harus diikuti sesuai aturan. Pemilihan kata ini dapat menimbulkan kesan bahwa kubu Ganjar-Mahfud bersiap untuk bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya, kata "pada 24 Maret 2024" memberikan kejelasan terkait waktu pengajuan gugatan. Pemilihan kata ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar waktu yang terukur, menekankan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tokoh politik menekankan "jadwal KPU mengumumkan pada 20 Maret." Pemilihan kata "jadwal" menunjukkan bahwa pengumuman hasil Pilpres oleh KPU dipandang sebagai suatu waktu yang sudah ditentukan. Frasa "kan berarti 3 hari setelah itu" menciptakan naratif keterkaitan waktu secara langsung dengan tindakan yang akan diambil. Pilihan kata "berarti" memberikan penekanan bahwa jadwal pengajuan gugatan telah dihitung secara cermat dan terkait erat dengan pengumuman hasil KPU.

Dengan menggunakan frasa "kata Mahfud saat jogging di Gelora Bung Karno (GBK) pada Jumat, 1 Maret 2024," naratif kejadian diperkuat dengan konteks tempat dan waktu. Pemilihan kata "saat jogging" dapat memberikan kesan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai, namun kontennya tetap mengandung kejelasan dan kesiapan untuk mengajukan gugatan. Secara keseluruhan, konstruksi naratif dan retorika politik dalam pernyataan ini mencerminkan penekanan pada keterbatasan waktu, perencanaan yang matang, dan kesiapan untuk mengikuti prosedur hukum dalam mengajukan gugatan ke MK setelah pengumuman hasil Pilpres oleh KPU.

Data 5:

"Meski TDK belum mengajukan gugatan, Mahfud menuturkan tim hukum pasangan calon nomor urut 03 telah menyiapkan bukti untuk sidang sengketa Pilpres. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) tersebut menegaskan partai pengusung, Ganjar-Mahfud, yakni PPP dan PDIP, akan solid dan tidak gembos dalam mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024".

Analisis teks tersebut, dapat dilihat bagaimana pemilihan kata dengan penggunaan kata "Meski," tercipta kontras yang menekankan perlawanan terhadap harapan umum. Meskipun belum ada gugatan resmi, pesan yang disampaikan adalah bahwa persiapan sedang dilakukan. Kemudian, penyebutan "tim hukum pasangan calon nomor urut 03" memberikan kesan kesiapan dan keorganisasian, menegaskan bahwa langkah ini bukanlah tindakan spontan melainkan sebuah

perencanaan matang. Penggunaan kata "solid" dan "tidak gembos" menciptakan naratif solidaritas dan keberanian, menegaskan bahwa partai pengusung, PPP dan PDIP, bersatu dan kuat dalam menghadapi sengketa Pilpres. Frasa ini membentuk citra kekuatan dan kebulatan tekad.

Selanjutnya, dengan menyebut "hak angket di DPR," frasa ini menyoroti langkah politik untuk menyelidiki dugaan kecurangan. Hak angket di DPR diangkat sebagai instrumen yang mencerminkan akuntabilitas dan penegakan demokrasi. Penggunaan frasa "dugaan kecurangan Pemilu 2024" menciptakan naratif bahwa ada dugaan kecurangan, menyoroti isu ketidaksetaraan atau ketidakberesan dalam proses pemilihan. Penyebutan gelar "Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan" memberikan bobot dan otoritas pada pernyataan Mahfud, membentuk citra keahlian dan kepercayaan pada tim hukum. Terakhir, dengan retorika nilai kesolidan dan keberanian, ungkapan "akan solid" dan "tidak gembos" menonjolkan nilai-nilai kesolidan dan keberanian sebagai elemen penting yang dianut oleh partai pengusung dalam menghadapi sengketa Pilpres. Melalui kalimat tersebut dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana setiap elemen bahasa digunakan untuk membentuk pesan dan citra tertentu dalam konteks persiapan sengketa Pilpres 2024.

Data 6:

"TPN sudah siap dan sudah lengkap. Sekarang MK buka kami bisa daftar. Jadi jangan dibilang kok diam saja, kami memang menunggu putusan resmi KPU," kata dia.

Pernyataan tersebut, terlihat menggunakan kata dan frasa yang dipilih dengan cermat untuk membentuk konstruksi naratif yang kuat, merinci retorika politik dan mengandung nilai-nilai tertentu: Dengan kata-kata "TPN sudah siap dan sudah lengkap," tercipta nuansa persiapan yang matang dan terorganisir. Frasa ini menciptakan gambaran bahwa TPN (Tim Pengacara Nasional) telah melakukan persiapan secara menyeluruh, menonjolkan kesiapan dan kompetensi tim hukum. Penggunaan kata "Sekarang MK buka kami bisa daftar" menunjukkan bahwa tim hukum menantikan pembukaan pendaftaran di Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap putusan resmi KPU. Pemilihan kata ini menggambarkan sikap proaktif dan responsif terhadap perkembangan situasi.

Dengan kata-kata "Jadi jangan dibilang kok diam saja," penggunaan "kok diam saja" menciptakan nuansa penolakan terhadap anggapan bahwa mereka tidak bergerak atau tidak melakukan langkah apa pun. Frasa ini digunakan untuk menegaskan bahwa mereka tidak pasif, melainkan tengah menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Pernyataan "kami memang menunggu putusan resmi KPU" memberikan alasan atau justifikasi atas tindakan menunggu. Pemilihan kata "memang" menonjolkan ketegasan dan kejelasan dalam niat mereka.

Secara keseluruhan, konstruksi naratif ini menciptakan gambaran bahwa tim hukum telah melakukan persiapan secara matang, responsif terhadap perkembangan, menolak anggapan ketidakaktifan, dan memberikan justifikasi terhadap sikap menunggu yang mereka ambil. Retorika politiknya menekankan kesiapan, responsivitas, dan ketegasan, sementara nilai-nilai seperti keorganisasian dan kejelasan niat juga terkandung dalam pernyataan tersebut.

Data 7:

"Adapun masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 ditutup pada 6 Februari 2024. Selanjutnya, masa reses DPR berlangsung mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024. Mahfud menuturkan, tim hukumnya akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka. Pernyataan tersebut sekaligus untuk membantah tuduhan Hak Angket sebatas gertakan".

Ditemukan beberapa elemen berdasarkan pemilihan kata, "Adapun masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 ditutup pada 6 Februari 2024". Penggunaan kata "adapun" dan penyebutan tanggal



menunjukkan pendekatan fakta dan pengaturan kronologis, memberikan dasar informasi mengenai waktu persidangan. Frasa "Selanjutnya, masa reses DPR berlangsung mulai 7 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024": Frasa ini memperkenalkan perubahan fase, dari masa persidangan ke masa reses, menciptakan transisi yang mengarah ke langkah selanjutnya.

Pernyataan "Mahfud menuturkan, tim hukumnya akan mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka": Pemilihan kata "menuturkan" memberikan kesan bahwa pernyataan ini adalah hasil langsung dari ucapan Mahfud, menekankan transparansi dan keterlibatan pribadi. Penggunaan Frasa "sekaligus untuk membantah tuduhan Hak Angket sebatas gertakan": Frasa ini menciptakan naratif pembelaan terhadap tuduhan yang menyebut hak angket sebagai gertakan, menunjukkan sikap tegas dan bermaksud membuktikan keseriusan langkah hukum yang akan diambil.

Retorika Politik Ketegasan dan Pembelaan: Pernyataan Mahfud memanfaatkan retorika politik untuk menekankan ketegasan dalam rencana tindakan dan memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang mungkin muncul. Nilai-nilai yang terkandung terlihat dalam pernyataan ini mencerminkan nilai-nilai transparansi, keseriusan, dan integritas dalam menghadapi tuduhan terhadap langkah hukum yang akan diambil. Dengan demikian, konstruksi naratif tersebut membentuk gambaran tentang perkembangan waktu, transisi fase, keterlibatan pribadi Mahfud, serta retorika politik dan nilai-nilai yang ingin diemphasiskan dalam konteks pernyataan tersebut.

Data 8:

"Tim tetap jalan, nunggu sidang. Jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan saja tidak diajukan. Diajukan ke mana kalau tidak ada sidang?," ujarnya.

Analisis beberapa elemen berdasarkan pemilihan kata "Tim tetap jalan, nunggu sidang": Pemilihan kata "tetap jalan" menciptakan kesan ketegasan dan keberlanjutan dari tim hukum. Penggunaan "nunggu sidang" menunjukkan kesiapan tim untuk bertindak sejalan dengan proses hukum. Pemilihan kata "Jangan masyarakat disesatkan," kata "jangan" bersifat imbauan atau peringatan, menunjukkan kepedulian terhadap persepsi masyarakat. Frasa ini menciptakan komunikasi tentang kejujuran dan ketidakmungkinan manipulasi informasi.

Pernyataan "wah itu gertakan saja tidak diajukan. Diajukan ke mana kalau tidak ada sidang?": Pernyataan ini menggunakan retorika politik dengan menyebut tuduhan sebagai "gertakan," menunjukkan bahwa tim hukum memiliki niat serius dan menolak pemahaman bahwa itu hanya upaya mengancam. Pertanyaan "Diajukan ke mana kalau tidak ada sidang?": Pertanyaan ini digunakan untuk merangsang pemikiran kritis dan menegaskan bahwa langkah hukum akan diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Retorika politik dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan tersebut mencerminkan retorika politik yang bersifat mempertahankan diri dan menjelaskan keputusan tim hukum. Terdapat nilai-nilai kejujuran, ketegasan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemahaman yang terkandung dalam retorika tersebut. Dengan demikian, konstruksi naratif ini memberikan gambaran tentang sikap tim hukum, retorika politik yang digunakan, dan nilai-nilai yang ingin ditekankan dalam menyikapi tuduhan terkait langkah hukum yang diambil.

Data 9:

"Tak hanya kubu Ganjar-Mahfud, kubu Anies-Muhaimin dikabarkan juga berencana mengajukan hak angket. Partai politik anggota Koalisi Perubahan menyatakan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Di sisi lain, Timnas AMIN juga akan menggugat hasil pilpres ke MK".

Dalam kalimat tersebut, terdapat beberapa elemen kata "Tak hanya kubu Ganjar-Mahfud, kubu Anies-Muhaimin dikabarkan juga berencana mengajukan hak angket": Penggunaan kata "tak hanya" menciptakan kesan bahwa langkah mengajukan hak angket bukan hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan juga dilakukan oleh kubu Anies-Muhaimin. Ini menciptakan naratif keseriusan dan kesepakatan antarpihak dalam menghadapi dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Penggunaan Frasa "Partai politik anggota Koalisi Perubahan menyatakan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024," frasa ini menciptakan komunikasi kerjasama dan dukungan antarpolitical dalam mengusut dugaan kecurangan. Penyebutan "mendukung" menonjolkan kerjasama dan

solidaritas. Penggunaan Frasa "Timnas AMIN juga akan menggugat hasil pilpres ke MK": Frasa ini memberikan informasi tambahan mengenai langkah hukum yang akan diambil oleh Timnas AMIN (Anies-Muhaimin). Pemilihan kata "juga akan" menunjukkan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya kubu Anies-Muhaimin dalam menanggapi hasil Pemilu 2024.

Retorika Politik dan Nilai-nilai yang Terkandung: Kalimat ini mencerminkan retorika politik yang menekankan koordinasi dan aksi bersama antarpihak politik untuk mengusut dugaan kecurangan. Terdapat nilai-nilai solidaritas, kesepakatan, dan kerjasama dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, analisis kalimat tersebut memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh kubu Anies-Muhaimin, kerjasama antarpolitical party politik, serta retorika politik dan nilai-nilai yang ingin ditekankan dalam menghadapi situasi pasca-Pemilu 2024.

Data 10:

"Mereka berjanji akan membeberkan semua bukti kecurangan Pilpres 2024 yang sudah dikantongi. Bukti-bukti itu akan disampaikan di MK maupun DPR RI jika bergulir hak angket. Anggota Dewan Pakar Timas AMIN, Refly Harun mengatakan bukti dan indikasi kecurangan Pemilu 2024 sebagian sudah diketahui masyarakat baik lewat pemberitaan media massa, podcast, maupun film dokumenter Dirty Vote".

Dalam kalimat tersebut, beberapa elemen pemilihan kata "Mereka berjanji akan membeberkan semua bukti kecurangan Pilpres 2024 yang sudah dikantongi": Penggunaan kata "berjanji" menciptakan kesan tanggung jawab dan komitmen untuk mengungkapkan kebenaran. Pemilihan kata "membeberkan" menekankan pada pengungkapan rinci dan detail, menciptakan naratif keterbukaan.

Frasa "Bukti-bukti itu akan disampaikan di MK maupun DPR RI jika bergulir hak angket": Frasa ini menciptakan naratif bahwa bukti kecurangan akan disampaikan di dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Pemilihan kata "bergulir" memberikan nuansa dinamis pada proses hukum yang mungkin terjadi. Penggunaan Gelar "Anggota Dewan Pakar Timas AMIN, Refly Harun": Penyebutan gelar ini memberikan otoritas dan keahlian pada Refly Harun, menciptakan citra bahwa pernyataannya didasarkan pada pemahaman mendalam. Penggunaan Frasa "bukti dan indikasi kecurangan Pemilu 2024 sebagian sudah diketahui masyarakat baik lewat pemberitaan media massa, podcast, maupun film dokumenter Dirty Vote": Frasa ini menciptakan naratif bahwa sebagian bukti kecurangan sudah diketahui oleh masyarakat melalui berbagai media. Pemilihan kata "sebagian" memberikan kesan bahwa masih ada bukti lain yang mungkin belum terungkap.

Retorika Politik dan Nilai-nilai yang Terkandung: Kalimat ini mencerminkan retorika politik transparansi dan akuntabilitas. Nilai-nilai seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan komitmen untuk mengungkap kebenaran ditonjolkan. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kalimat tersebut dibangun untuk menciptakan naratif tertentu, mengandung retorika politik, dan mengekspos nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh pihak yang bersangkutan dalam konteks pengungkapan bukti kecurangan Pilpres 2024.

Data 11:

"Bukti itu kita kasih clue, nanti-nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi di panitia angket bukti itu dibebaskan. Tapi kalau Anda penasaran, sedikit-sedikit misalnya ya baca aja majalah Tempo edisi terakhir 19 Februari," kata Refly dalam diskusi 'Rakyat Bersuara' pada Selasa, 27 Februari 2024".

Dalam kalimat tersebut, terdapat sejumlah elemen pemilihan Kata "Bukti itu kita kasih clue": Penggunaan kata "kasih clue" menunjukkan pendekatan misteri atau teka-teki dalam mengungkapkan bukti. Frasa ini menciptakan naratif ketertarikan dan penasaran. Pernyataan "nanti-nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi di panitia angket bukti itu dibebaskan": Pernyataan ini menciptakan naratif bahwa bukti akan diungkapkan pada waktu dan tempat yang tepat, yaitu di Mahkamah Konstitusi dan di panitia angket. Pemilihan kata "dibebaskan" menekankan pada pengungkapan rinci dan detail. Pemilihan Kata "Tapi kalau Anda penasaran, sedikit-sedikit misalnya ya baca aja majalah Tempo edisi terakhir 19 Februari": Pemilihan kata "sedikit-sedikit" menekankan bahwa informasi bisa ditemukan secara bertahap. Menyarankan untuk membaca majalah Tempo edisi terakhir memberikan naratif kerjasama antara pihak yang bersangkutan dan media massa.

Retorika Politik dan Nilai-nilai yang terkandung dari kalimat ini mencerminkan retorika politik keterbukaan sekaligus menjaga misteri. Nilai-nilai seperti transparansi, keterlibatan masyarakat (melalui membaca majalah), dan pengungkapan bertahap ditonjolkan. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kalimat tersebut dibangun untuk menciptakan naratif tertentu, mengandung retorika politik, dan mengekspos nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh pihak yang bersangkutan dalam konteks pengungkapan bukti kecurangan Pilpres 2024.

Data 12:

"Tak hanya pemberitaan di majalah Tempo, Refly juga memberikan bocoran lainnya terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024. Rujukan lainnya, kata dia, siniar milik Tempo, Bocor Alus Politik dan Film Dokumenter Dirty Vote. Film yang tayang di YouTube ini mengungkapkan sejumlah indikasi kecurangan jelang Pemilu 2024".

Dalam kalimat tersebut, dapat diuraikan elemen-elemen berikut berdasarkan pemilihan kata, frasa, konstruksi naratif, retorika politik, dan nilai-nilai yang terkandung. Pemilihan Kata "memberikan bocoran lainnya terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024": Pemilihan kata "bocoran" menciptakan citra rahasia atau informasi yang diungkapkan secara tidak resmi. Pemilihan frasa ini menonjolkan konsep kecurangan dalam Pemilu 2024 dan memberikan kesan bahwa ada informasi yang belum terungkap sepenuhnya. Pemilihan Kata "Rujukan lainnya, kata dia, siniar milik Tempo, Bocor Alus Politik dan Film Dokumenter Dirty Vote".

Pemilihan kata "rujukan lainnya" menyoroti variasi sumber informasi. Penggunaan kata "kata dia" menegaskan bahwa informasi ini datang dari Refly. Penyebutan siniar, Bocor Alus Politik, dan Film Dokumenter Dirty Vote memberikan naratif sumber-sumber yang beragam dan mendalam. Pemilihan Kata "Film yang tayang di YouTube ini mengungkapkan sejumlah indikasi kecurangan jelang Pemilu 2024": Pemilihan kata "mengungkapkan" menekankan pada pengungkapan fakta dan bukti. Pemilihan frasa ini menciptakan naratif bahwa film dokumenter ini memiliki nilai investigatif dan mengandung bukti konkret.

Retorika Politik dan Nilai-nilai yang Terkandung: Kalimat ini mencerminkan retorika politik transparansi dan ketertarikan untuk menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Nilai-nilai seperti keterbukaan, keterlibatan publik, dan pentingnya sumber informasi yang beragam ditonjolkan. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kalimat tersebut dibangun untuk menciptakan naratif tertentu, mengekspresikan retorika politik, dan mengekspos nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh pihak yang bersangkutan dalam konteks pengungkapan indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Data 13:

“Itu kan sebuah indikasi bahwa semua kecurangan itu ada. Dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik barangkali sejak tahun 2020-2021 suda ada nuansa seperti itu,” ujarnya.

Dalam kalimat tersebut, berikut adalah analisis berdasarkan pemilihan kata, "itu kan sebuah indikasi bahwa semua kecurangan itu ada": Penggunaan kata "indikasi" memberikan kesan bahwa pernyataan ini didasarkan pada bukti atau petunjuk yang ada. Pemilihan kata "semua kecurangan" menciptakan naratif bahwa kecurangan dalam Pemilu 2024 tidak hanya satu, melainkan berbagai bentuk. Pemilihan Kata "Dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan, tapi sebelum pencoblosan": Pemilihan kata "tidak hanya" menunjukkan kompleksitas isu kecurangan yang dihadapi. Pemilihan frasa ini mengarahkan perhatian pada kecurangan yang terjadi sebelum proses pencoblosan, menciptakan naratif bahwa isu ini tidak terbatas pada satu tahapan pemilihan saja. Pemilihan Kata "Bahkan kalau kita tarik barangkali sejak tahun 2020-2021 sudah ada nuansa seperti itu": Pemilihan kata "tarik" dan frasa "sejak tahun 2020-2021" menciptakan naratif bahwa indikasi kecurangan ini dapat ditelusuri dan dipahami sejak waktu yang lama. Pemilihan kata "nuansa" menekankan bahwa ada tanda-tanda atau perasaan tertentu yang dapat mengisyaratkan kecurangan.

Retorika Politik dan Nilai-nilai yang Terkandung: Kalimat ini mencerminkan retorika politik kehati-hatian dan keberanian untuk membuka isu yang melibatkan jangka waktu yang lebih lama. Pernyataan ini mengandung nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keinginan untuk menyelidiki serta mengungkap potensi kecurangan. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kalimat tersebut dibangun untuk menciptakan naratif tertentu, mengekspresikan retorika politik, dan mengekspos nilai-nilai yang ingin ditekankan dalam konteks pengungkapan indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Data 14:

“Sedangkan terkait bukti yang disiapkan untuk diajukan ke MK, Refly enggan mengatakan lebih lanjut. Namun dirinya meyakinkan, selain dari Majalah Tempo, ia mengaku punya sumber sendiri. “Ya itu jadi salah satu sumber (Majalah Tempo). Saya juga punya sumber. Tapi yang mau saya katakan adalah masa media sekredibel Tempo, masa sih menyebarkan hoaks. Kan begitu. Rasanya nggak mungkin,” katanya”.

Dalam kalimat tersebut, dapat diuraikan analisis berdasarkan pemilihan kata, frasa, konstruksi naratif, retorika politik, dan nilai-nilai yang terkandung. Pemilihan Kata "Refly enggan mengatakan lebih lanjut": Pemilihan kata "enggan" menciptakan nuansa penahanan informasi atau kebijakan untuk tidak memberikan rincian lebih lanjut. Hal ini dapat menciptakan rasa misteri atau ketertarikan terhadap bukti yang disiapkan.

Pemilihan Frasa "Namun dirinya meyakinkan," Pemilihan kata "meyakinkan" mengindikasikan upaya Refly untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada audiens terkait kevalidan bukti yang dimilikinya. Hal ini dapat diartikan sebagai strategi untuk membangun kredibilitas. Pemilihan Kata "sumber sendiri": Penggunaan kata "sumber sendiri" menyoroti bahwa Refly memiliki sumber informasi yang independen dari Majalah Tempo. Hal ini dapat menciptakan kesan keberagaman bukti dan kepercayaan pada sumber-sumber informasi yang berbeda.

Retorika Politik dan Nilai-nilai yang Terkandung: Pernyataan Refly menciptakan retorika politik transparansi dan kritik terhadap keberagaman media. Dia menegaskan bahwa, selain dari Majalah Tempo, dia memiliki sumber sendiri, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menghindari



pemikiran bahwa informasi hanya bersumber dari satu sumber saja. Pernyataannya juga menunjukkan kepercayaan pada kredibilitas Tempo sebagai media.

Konstruksi Naratif "Rasanya nggak mungkin": Pernyataan ini membentuk naratif ketidakmungkinan bahwa media yang sekuat Tempo akan menyebarkan hoaks. Ini menciptakan argumentasi bahwa sumber informasi yang berasal dari Tempo memiliki kecenderungan lebih kredibel.

Analisis tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana kalimat tersebut dirancang untuk menciptakan naratif tertentu, mengekspresikan retorika politik, dan menonjolkan nilai-nilai tertentu dalam konteks persiapan sengketa Pilpres 2024.

Berikut Tabel 1 Analisis Point Berita Online TEMPO.CO pada Minggu, 03 Maret 2024, jam 09:35 WIB, yaitu:

Tabel 1 Analisis Point Berita Online TEMPO.CO.

No	Point inti berita	Analisis
1.	Wacana Penggunaan Hak Angket	Anggota DPR, termasuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, mengusulkan penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tim hukum Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud bersiap untuk menempuh jalur hukum setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2024 oleh KPU pada 20 Maret.
2.	Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)	TPN Ganjar-Mahfud, khususnya Mahfud Md, menyatakan bahwa gugatan ke MK akan diajukan tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024, yaitu pada 24 Maret 2024. Tim hukum Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bukti untuk sidang sengketa Pilpres.
3.	Partisipasi Partai Politik	Partai politik, seperti PPP dan PDIP, dikatakan solid dan tidak akan mundur dalam mendukung hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Partai-partai ini berencana melayangkan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
4.	Bukti Kecurangan	Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud berjanji akan membeberkan bukti kecurangan Pemilu 2024 yang sudah dikantongi. Refly Harun dari Timnas Amin menyebut bahwa bukti tersebut termasuk pemberitaan di majalah Tempo, podcast, dan film dokumenter "Dirty Vote."
5.	Waktu Persidangan dan Reses DPR	Masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 telah ditutup pada 6 Februari 2024, dan masa reses DPR berlangsung mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024. Tim hukum Ganjar-Mahfud berencana mengajukan hak angket ketika masa persidangan DPR dibuka.
6.	Penekanan pada Kesiapan dan Kredibilitas	TPN Ganjar-Mahfud menekankan bahwa mereka sudah siap dan memiliki bukti lengkap untuk





	disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres.
	Refly Harun menekankan kredibilitas sumber bukti, dengan merujuk pada majalah Tempo dan sumber lain yang dipertahankannya.
7. Indikasi Kecurangan Sejak Tahun 2020-2021	Refly Harun menyebut bahwa indikasi kecurangan bukan hanya terjadi saat pencoblosan, tapi sudah ada sejak tahun 2020-2021.

Pemilihan Presiden tahun 2024 di Indonesia telah menimbulkan berbagai isu dan kontroversi. Salah satu isu yang paling menonjol adalah rencana kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tujuan membatalkan hasil pilpres.

Isu ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan volatil dalam konteks pemilihan presiden di Indonesia. Dalam analisis wacana kritis, isu ini ditelusuri lebih lanjut untuk memahami bagaimana narasi dan retorika politik digunakan oleh berbagai pihak untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk diskursus politik.

Kontruksi politik dapat dimainkan melalui retorika aktor politik; anggota DPR, termasuk Caper 03 Ganjar Pranowo dan Capres 01 Anies Baswedan, telah mengusulkan penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menggunakan mekanisme parlemen untuk menyelidiki dan menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan.

Tim hukum dari kedua kubu tersebut juga telah bersiap untuk menempuh jalur hukum setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menyiapkan strategi hukum untuk menghadapi hasil pemilihan.

Selain itu, partai politik seperti PPP dan PDIP dikatakan solid dan tidak akan mundur dalam mendukung hak angket di DPR. Ini menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk mengejar keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan.

Namun, yang paling menarik adalah klaim bahwa Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bukti kecurangan Pemilu 2024. Bukti ini diklaim mencakup pemberitaan di majalah Tempo, podcast, dan film dokumenter "Dirty Vote." Jika klaim ini benar, ini bisa menjadi bukti kuat dalam sidang sengketa Pilpres.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa isu tentang gugatan ke MK adalah bagian dari dinamika politik yang lebih besar dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Ini mencerminkan bagaimana berbagai pihak menggunakan narasi dan retorika politik untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk diskursus politik. Namun, hasil akhir dari proses ini masih harus ditentukan oleh proses hukum dan demokrasi di Indonesia.

4. PENUTUP

Isu gugatan ke MK oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mencerminkan ketegangan dan kompleksitas politik dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Narasi dan retorika politik menjadi alat penting yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mempengaruhi opini publik. Mekanisme parlemen, seperti hak angket, menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk menyelidiki dugaan kecurangan, menunjukkan peranan aktif DPR dalam dinamika politik ini. Kesiapan tim hukum kedua kubu menunjukkan antisipasi terhadap hasil pemilihan dan strategi hukum yang telah disiapkan.



Dinamika politik Pemilu 2024 di Indonesia adalah refleksi dari bagaimana narasi dan retorika politik dapat mempengaruhi opini publik. Meskipun ada klaim tentang kecurangan dan kontroversi, proses hukum dan demokrasi akan menjadi penentu akhir dari semua isu ini. Keterlibatan aktif masyarakat, transparansi proses pemilihan, serta integritas semua pihak yang terlibat akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam penelitian ini. Mulai dari Pimpinan Universitas Singaperbangsa Karawang, Dekan FISIP dan jajarannya, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, kolega dosen, staf administratif, dan tentu saja keluarga tercinta, anak dan istri penulis. Dukungan dan bantuan mereka telah menjadi bagian integral dari penelitian ini dan berkontribusi besar terhadap hasil akhirnya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru yang berharga bagi semua pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat luas. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen Anda semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgiansyah, A. (2022). Pemetaan Berita Politik Dari Media Terafiliasi Politisi (Telaah Berita-Berita Tvone Di Twitter). *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.35842/massive.v2i2.72>
- BBC New Indonesia. (2024). Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bersiap gugat hasil penghitungan suara ke MK, apa saja yang sudah diketahui? *BBC New Indonesia*, 1.
- Fitriana, P. A., Ema, & Oktariani, F. L. (2020). *Perang Tagar Di Ruang Virtual Diskursus Politik Capres Pasca Debat Putaran Kedua*. 30–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i1.5622>
- Hidayah, W., Wuryaningrum, R. S. P., & Pornomo, B. S. P. (2022). Ideologi Dan Konteks Sosial Dalam Teks Berita Pengesahan Ruu Kpk Pada Portal Berita Daring Nasional. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(1), 106. <https://doi.org/10.30651/lf.v6i1.7403>
- Khoirul, H. M., & Dian, S. A. (2024). Persiapan Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ajukan Hak Angket DPR dan Gugatan Pemilu 2024 ke MK. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1840352/persiapan-kubu-anies-muhaimin-dan-ganjar-mahfud-ajukan-hak-angket-dpr-dan-gugatan-pemilu-2024-ke-mk>
- Maghvira, G. (2017). Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan TEMPO.CO tentang Kematian Taruna STIP JAKARTA. *Jurnal The Messenger*, 9(2), 120. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v9i2.463>
- Marzuki, I. (2023). *Aanalisis Wacana Kritis (Teori dan Praktik)* (2021st ed.).
- Pramitasari, A., & Nanda Ayu Clarasida. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Pemberitaan “Satgas Covid-19 Ingatkan Prokes Wajib Ditaati” dalam Media Cetak Suara Merdeka. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 113–123. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i2.151>